

The Place and Space of Harmony: Religion in A Multireligious Society in Indonesia

Zuhairi¹, Ahmad Muzakki²

¹Zuhairi, IAIN Metro Lampung,
zuhairi@metrouniv.ac.id

²Ahmad Muzakki, IAIN Metro
Lampung,
ahmadmuzakki@metrouniv.ac.id

Corresponding Author:

Zuhairi, IAIN Metro Lampung,
zuhairi@metrouniv.ac.id

Kata kunci: *harmoni, keragaman
agama, kebhinnekaan, pendidikan,
masyarakat.*

Submitted: 27/08/2023

Accepted: 25/09/2023

Online Published: 15/10/2023

Citation: Zuhairi, Ahmad
Muzakki., The Place and Space of
Harmony: Religion in A
Multireligious Society in
Indonesia, *Annual International
Conference on Education Research*,
1(1) 2023; 11-29

Abstract

Tingginya keragaman di dalam masyarakat tidak selalu memunculkan situasi konflik dan kompetisi. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa tingkat sensitivitas kelompok terhadap isu-isu terkait keragaman, misalnya etnisitas dan agama, ternyata berbeda-beda. Identifikasi atas faktor-faktor apa saja yang mampu menekan sensitivitas dalam keragaman tersebut akan menjadi sumbangan penting bagi pembangunan harmoni sosial. Kota Metro adalah salah satu daerah yang memiliki tingkat konflik yang rendah terkait dengan isu keragaman. Studi ini fokus pada pendidikan harmoni dan kesadaran di dalam interaksi sosial masyarakat multicultural. Dengan memfokuskan diri pada bagaimana konstruk pendidikan harmoni dan kesadaran dipraktikkan, studi ini memotret faktor apa saja yang berperan penting di dalam proses konstruksi pendidikan harmoni, dan strategi untuk menguatkan kohesi sosial. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penting dalam pembangunan harmoni di Kota Metro, yakni (1) kepemimpinan yang kuat dan mengakar, (2) melembaganya harmoni dalam praktik sehari-hari, dan (3) adanya kesadaran kolektif tentang identitas bersama. Studi ini menyarankan masih perlunya penelitian lanjutan untuk menguji model ini dengan variabel dan konteks keragaman (kultur, administrative, dan infrastruktur ekonomi politik) yang lebih luas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dialektika kerukunan dan keragaman.

Introduction

Dialektika agama atas kebhinnekaan akan menghasilkan konstruk pendidikan harmoni yang menarik untuk dijadikan semacam *blue-print* bagi daerah yang sering dilanda konflik. Kota Metro menjadi salah satu latar dan *locus* tingkat keragaman budaya yang tinggi. Keragaman agama, suku, bahasa dan adat istiadat yang ada menjadi fenomena *harmony in diversity* yang sangat menarik. Di antara 15 kabupaten/kota di Lampung, Kota Metro menjadi salah satu daerah yang minus dari "huru-hara" dan "geger sosial" yang menjurus ke arah konflik horizontal. Sebaran heterogenitas agama dan etnis yang mencakup suku Jawa, Lampung, Batak, Palembang, Minang, Banten, Bugis, Madura dan lainnya menunjukkan tingginya tingkat toleransi dan harmoni masyarakat Kota Metro. Kondisi keragaman konstruk sosio-kultural yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat berpotensi sebagai ancaman, namun fenomena tersebut justru menjadi peluang kekayaan kultural yang mengikat relasi antarkelompok, etnis dan agama di Kota Metro.

Membangun kerukunan umat beragama sekaligus ke-bhinnekaan menjadi sebuah idaman dan tantangan yang tidak mudah diwujudkan. Kerukunan menjadi isu besar yang secara langsung berhadapan dengan persoalan kontestasi klaim kebenaran antaragama

(Mursyid 2009; Pikoli, Trinugraha, and Yuhastina 2021; Indah Permata Sari 2020; Sihombing, Abdullah, and Prasajo 2020; Bishwanath Sharma and Shantilata Devi 2021); sementara kebhinnekaan menjadi semboyan dan sekaligus komitmen yang berfungsi untuk merawat serta mengembangkan kehidupan masyarakat multikultural di negara ini (Muqoyyidin 2014; Abdullah 2003). Namun demikian, kedua kepentingan ini seringkali berbenturan dan memunculkan paradok antara kebenaran agama yang cenderung monolitik dan amanat kebhinnekaan yang menjamin perkembangan masyarakat multikultural. Karenanya diperlukan upaya 'mendamaikan' antara klaim kebenaran agama dan kebhinnekaan dalam siklus negara menuju integrasi bangsa.

Sejauh ini studi tentang dialektika antarkerukunan beragama dan kebhinnekaan sering berhenti pada paparan tentang paradox antara agama dan masyarakat plural (Haryanto 2014; Kahmad 2000; Supardi 2013; Prihantoro 2016). Sekalipun demikian, dalam kontek masyarakat multikultural yang berkembang, penekanan terhadap nilai-nilai komunal untuk membangun pemahaman serta pengetahuan budaya, agama dan perilaku yang berbeda sedang menjadi tren dunia. Perspektif tentang integrasi agama dalam program orientasi hidup atau kecakapan hidup menjadi masalah moral dan tantangan yang harus diwujudkan (Ferguson and Roux 2003). Sejalan dengan itu, proses dialektika agama merupakan bentuk tindakan keagamaan dan sebagai wujud tindakan kredibilitas tertingginya (Lombaerts 2011; Muqoyyidin 2012; 'aini and Mustaqim 2017). Di sisi lain, dinamika agama telah menawarkan cara baru bagi seseorang untuk memahami dan menggunakan agamanya dalam memasukkan atau mengecualikan orang lain dalam suatu relasi, sehingga agama akan berfungsi meningkatkan atau menghambat kolaborasi lintas status sosial dan perbedaan agama (Lichterman 2008; Dunn and Creek 2015; Zulfa 2014). Melalui sumberdaya agama-agamanya, menurut (Yousefzadeh 2018) manusia modern saat ini telah berhasil menemukan solusi bagi krisis sosial dan epistemologis yang sedang dihadapi.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi tentang konstruk pendidikan harmoni dan kesadaran di dalam interaksi sosial masyarakat multikultural, dengan memfokuskan diri pada tiga pertanyaan pokok: (a) bagaimana konstruk pendidikan harmoni dan kesadaran dipraktikkan dan menjadi pengalaman kolektif di dalam interaksi sosial masyarakat (b) Faktor apa saja yang berperan penting di dalam proses konstruksi pendidikan harmoni dan kesadaran sehingga semakin menguatkan kohesi sosial; (c) bagaimana strategi konstruk pendidikan harmoni tersebut dapat berhasil membentuk kesadaran masyarakat multikultural yang memiliki ruang toleransi yang mampu meredam potensi konflik di dalam masyarakat.

Tulisan ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa perbedaan latar belakang agama dan kebudayaan yang beragam dalam suatu masyarakat tidak selalu melahirkan konflik sebagaimana lazim terjadi. Sebaliknya keragaman juga dapat diselesaikan dengan berhasilnya suatu masyarakat membangun harmoni. Keberhasilan dalam membangun harmoni tersebut dapat terjadi karena (1) adanya strong leadership yang mampu menjalin kesepahaman dengan tokoh lain dalam mendudukan persoalan secara objektif, dan secara internal dipercaya oleh para anggota kelompoknya; (2) adanya institusionalisasi harmoni yang mampu mewadahi dan menjembatani komunikasi antar kelompok; dan (3) adanya kesadaran kolektif yang tinggi akan perlunya hidup bersama. Ketiga aspek tersebut secara

bersama-sama membentuk infrastruktur penting dalam pembentukan harmoni di dalam masyarakat.

Literature Review

2.1 *Mutual Identity*

Menurut (Intan Pemata Sari 2014) studi tentang identitas tidak terlepas dari sejarah pendekatan interaksionalisme simbolis. Identitas dipahami sebagai satu bentuk proses pendefinisian diri yang melibatkan adanya interaksi dengan orang lain (Márquez 2017). Sementara interaksi atau relasional memposisikan diri seseorang dengan yang lain, dimana relasionalitas terbentuk karena adanya ikatan social, komitmen, kesamaan, kebersamaan, dan keterikatan (Pfaffendorf 2019; Fergus and Reid 2001). Di dalam identitas, terdapat wacana mengenai sistem aturan, norma, dan makna (Terlouw 2018). Sistem aturan, norma dan makna tersebut mampu mengkonstruksi identitas dan tindakan sosial, serta politik dan budaya yang membantu seseorang untuk memahami dunia dan bertindak dengan tepat (Terlouw 2018). Dengan adanya tatanan yang terkandung di dalam identitas, maka identitas tidak hanya merujuk pada individu saja. Identitas, juga dapat dipahami sebagai identitas sosial yang menautkan hubungan di antara masing-masing individu. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai tanda, seperti kategori sosial berupa usia, jenis kelamin, kelas sosial dan sebagainya (Nasrullah 1970).

Mutualitas dalam kaitannya dengan identitas, merupakan sebuah institusi yang disengaja, yang tidak hanya dilihat sebagai sebuah proses interaksi manusia yang lebih umum. Mutualitas, terbangun oleh adanya kesepakatan atau kontrak serta penerimaan oleh masing-masing individu. Bentuk kesepakatan yang ada, menjadikan mutualitas dipahami sebagai suatu bentuk hubungan atas adanya keinginan bersama (Foster 2012; Fergus and Reid 2001). Identitas mutual, selanjutnya dicontohkan oleh (Wong 2019) melalui studi kasus yang terjadi di antara Hongkong, China, dan Taiwan. Paparnya, mutualisme dapat terbentuk karena adanya solidaritas yang menjadi elemen di dalam sebuah keanggotaan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesamaan rasa dan interaksi yang terjadi, hingga rasa saling ketergantungan ketika Hongkong dan Taiwan harus menghadapi China sebagai “musuh bersama”. Dengan solidaritas di antara Hongkong dan Taiwan, proses identitas dan mutualitas pun dibangun dan direproduksi sebagai pengalaman bersama. Pembentukan identitas mutualitas tersebut, kemudian menaruh makna penting sebagai suatu peluang dan kemajuan dalam melawan kebangkitan China (Wong 2019).

2.2 *Cultural Communication-Interaction*

Para sarjana *Interpretivist*, melihat bahwa studi mengenai komunikasi dan budaya adalah studi yang menekankan konstruksi pengetahuan sosial budaya. Studi tersebut mencakup hubungan di antara kekuasaan, keanekaragaman budaya, identitas gender, hingga pembubaran geopolitik dalam batas-batas globalisasi (Russo 2011). *Cultural Communication* sendiri juga mencakup studi eksplorasi yang melihat bagaimana orang berkomunikasi dalam konteks di mana mereka berinteraksi (Paulston, Kiesling, and Rangel 2012). Hal tersebut mencakup komunikasi lintas budaya, yang dipahami sebagai studi komparatif dan interaksional. Di dalam komunikasi antar budaya, selain adanya konstruksi pengetahuan, para tokoh esensialisme melihat terdapat pendekatan konstruksi sosial dan linguistic yang

kemudian membawa budaya dan identitas menjadi ada (Paulston, Kiesling, and Rangel 2012). Studi tersebut melihat pada bagaimana budaya diuraikan oleh individu, bagaimana individu berperilaku, dan bagaimana budaya membawa berbagai cara dan gaya komunikasi oleh setiap individu (Issa and Yunusa 2015). Bentuk identitas dan budaya, selanjutnya dapat menjadi bagian dari memori kultural. Memori yang ada memungkinkan manusia untuk hidup dalam kelompok dan komunitas yang terdapat interaksi dan komunikasi di dalamnya.

Dengan fakta bahwa budaya dan komunikasi menjadi bagian dari memori kultural, maka komunikasi antar budaya didefinisikan oleh (Hofstede and Hofstede 1991) sebagai “perangkat lunak pikiran”. Menurutny, jika semua memori manusia dihapuskan, maka yang tersisa hanyalah perangkat lunak yang mewakili kebudayaan seseorang. (Issa and Yunusa 2015; Piller 2011) kemudian melihat bahwa perilaku komunikatif seorang individu tidak lepas dari hasil interaksi dengan faktor budaya. Budaya menentukan sikap, nilai, praktik, dan harapan dalam berkomunikasi. Budaya yang dilibatkan tersebut, kemudian membuat adanya komunikasi antar budaya, di mana terjadi negosiasi identitas budaya dengan aturan makna, persepsi dalam proses interaksi. Pengalaman komunikasi antar budaya kemudian membantu individu untuk mengetahui dan menghargai budaya lain, tetapi juga untuk lebih memahami budayanya sendiri. Di dalam proses komunikasi, (Issa and Yunusa 2015) melihat betapa pentingnya untuk saling memahami keinginan dan kebutuhan masing-masing individu. Dengan melihat keinginan dan kebutuhan tersebut, komunikasi yang ada diantara budaya akan mudah terjalin. Meskipun begitu, Issa melihat bahwa terdapat kendala di dalam komunikasi antar budaya, yakni adanya perbedaan perilaku maupun persepsi seseorang.

2.3 *Collective Space*

Collective space atau ruang bersama, dipahami sebagai suatu ruang yang melibatkan adanya dimensi politik dan sosial. Ruang ini, dapat dibedakan dari batasan kepemilikan atau penanda kekuasaan melalui keterikatan tradisional (Pantelidou 2011). Ruang kolektif atau ruang bersama, muncul sebagai ruang ambang yang membedakannya dengan ruang publik, di mana terdapat tanda otoritas di dalamnya (Tsavdaroglou 2018). Collective space, kemudian berpotensi menjadi ruang yang berkembang sebagai ruang yang dibagi (Stavrides 2012). (Amin 2008) kemudian melihat bahwa ruang kolektif adalah hasil dari pra-kognitif dan respon terhadap letak multisiplisitas dan kebersamaan. Istilah kolektif sendiri, muncul atas dasar pengalaman manusia yang terus mendefinisikan situasi dan menyusun ruang tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Stavrides 2012) yang mengatakan bahwa ruang kolektif atau ruang bersama merupakan ruang yang diproduksi dalam upaya menampung partisipasi individu. Ruang tersebut dibuat oleh otoritas tertentu yang mengontrol aturan ruang di dalamnya. Namun berfungsi untuk umum atau bersama. Fungsi ruang tersebut kemudian berbeda dengan ruang pribadi yang dikelola untuk kepentingan seseorang.

(Pantelidou 2011) melihat, bahwa ruang privat dan akumulasi pribadi merupakan bagian dari batas-batas ruang kolektif. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya partisipasi politik dan komunikasi yang terjadi di dalam ruang, di mana individu dan kelompok terlibat dalam tindakan aktivis praktik 'klasik'. Sehingga, ruang publik sebagai ruang kolektif, tidak luput dari ideologi sosial menuju individu. Ruang bersama atau ruang kolektif itu kemudian dicontohkan oleh (Stavrides 2012) berupa ruang pertemuan yang bersifat relasional dan

relative. Paparnya, diperlukan mekanisme agar orang-orang selalu menggunakan ruang bersama. Kasus lain dicontohkan oleh (Mujib, Abdullah, and Nugroho 2013), pasca tsunami, Aceh membutuhkan ruang publik yang dapat berfungsi untuk berdiskusi, berdialog, bahkan merundingkan bentrokan identitas Aceh dan pengaruh konstruksi global yang sedang membangun Aceh. Ruang tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai ruang bersama namun juga sebagai ruang yang memiliki akses yang tidak mudah ditolak dan dapat dipandang publik oleh para penggunanya. Ruang kolektif, juga dapat melebar seperti halnya dalam sebuah komunitas yang mana ruang kolektif berkaitan dengan kegiatan ekonomi, hubungan eksternal, sains dan pendidikan (Potemkina 2010).

Methods

Masyarakat kota Metro di Lampung yang sangat beragam dan damai merupakan representasi ideal pembangunan harmoni tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara yang bercorak multikultur. Tingginya keragaman terutama terkait agama dan etnis seringkali berbanding lurus dengan risiko konflik, oleh karena itu rendahnya konflik di Kota Metro menunjukkan adanya praktik-praktik baik (good practices) yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan harmoni. Studi ini bersifat kualitatif bersandar pada teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan teks kebijakan daerah. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintahan dijadikan informan kunci untuk mendalami aspek kearifan local dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan harmoni.

Pengamatan terlibat dilakukan untuk melihat praktik-praktik kerukunan dalam konteks keragaman. Bentuk-bentuk kegiatan kolektif, baik yang diinisiasi secara mandiri oleh individu dan komunitas maupun yang difasilitasi oleh pemerintah, merupakan sumber penting untuk analisis deskriptif yang dilakukan. Kegiatan komunal baik yang bersifat ritualistic (misalnya upacara terkait lifecycle) maupun yang bersifat formal (rapat-rapat RT/RW, kerja bakti lingkungan hingga perayaan hari besar) diobservasi untuk mendukung deskripsi penelitian.

Wawancara terstruktur dilakukan kepada semua informan, yang terdiri dari tokoh adat, pejabat pemerintah, tokoh agama, akademisi, aktivis sosial, dan budayawan, dengan bentuk pertanyaan terstruktur yang sama untuk mendapatkan perspektif kelompok terhadap konsep kerukunan, kebhinnekaan, serta praktik kolektif yang dilakukan masyarakat. Para tokoh adat ditanyai tentang landasan filosofis di balik ajaran adat tentang komunalitas dan pentingnya kerukunan. Para tokoh pemerintahan dan akademisi ditanyai tentang implementasi konsepsi *piil pesenggiiri* di dalam kebijakan-kebijakan public, serta kajian ilmiah terkait pelaksanaan adat tersebut, khususnya dengan pembentukan harmoni. Data-data ini kemudian didukung dengan teks buku dan jurnal yang telah diterbitkan digunakan untuk mendukung data lapangan hasil observasi dan wawancara. Hal ini merupakan upaya pengayaan literature agar penelitian lebih integrative, mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya dianalisa dengan tehnik induktif, guna memberi gambaran secara deskriptif yang kemudian diinterpretasi untuk penarikan kesimpulan.

Result

4.1 Menghidupkan identitas yang sama

Menghidupkan identitas yang sama di sebuah kawasan yang komponen penduduknya beragam menjadi pekerjaan tidak mudah, apalagi konsekuensi itu muncul seiring dengan



sejarah pertumbuhan kawasannya. Sejak awal, Kota Metro-Lampung dibangun di atas relasi sosial yang multikulturalistik. Melalui program kolonisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk mengembangkan kota-kota baru di luar Jawa, akhirnya Kota Metro terbentuk. Sejatinya, kawasan ini merupakan tanah ulayat masyarakat adat Buay Nuban yang secara suka rela di “hibahkan” kepada para “kolonis”¹ Jawa tahun 1936 silam. Selanjutnya, kawasan ini rencanakan menjadi sebuah kota kecil pusat pemerintahan (onderdistrik) bernama Metro, yang dikepalai oleh seorang Asisten Demang keturunan Jawa dan dibantu oleh pemimpin-pemimpin marga lokal yang disebut *pesirah* (Sudarmono 2004; Muzakki 2015).

“Kawasan ini merupakan tanah ulayat kami warga Buay Nuban. Atas kesepakatan dari tetua-tetua adat, kami rela “mewakafkan” tanah adat kami untuk ditempati oleh warga pendatang dari Jawa. Kami berharap mereka bisa menjadi mitra untuk membangun kawasan ini. Kami bisa menerima mereka apa adanya, asalkan niat dan tujuan datang kesini baik. Kami juga punya prinsip terbuka dan menerima perbedaan.” (Humaidi Elhudri Glr. *Suttan Kanjeng Sunan Agung*, tokoh masyarakat adat Lampung).

“Kami datang di *alas gung lewang lewung* tanpa membawa “apa-apa”. Kami hanya membawa semangat untuk hidup yang lebih baik. Kami datang ke sini sudah disiapkan lokasinya. Sebelum ditempatkan dipenampungan sementara (*bedding*), kami datang disambut cukup meriah oleh masyarakat setempat dan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Setelah itu, kami dipisah-pisah ke wilayah-wilayah yang akan dibuka.” (Sumowiyoto, sesepuh desa).

Kawasan hutan belantara ini lambat laun berkembang menjadi pusat ekonomi dan jantung pendidikan di Propinsi Lampung. Sarana dan prasarana infrastruktur yang terus berkembang secara signifikan menjadikan Kota Metro sebagai “medan magnet” yang menarik bagi banyak pendatang untuk melangsungkan kehidupan di kota ini. Dampaknya, kota ini memiliki lapisan masyarakat yang semakin beragam dan multikultural. Cita-cita membangun kehidupan harmonis di Kota Metro tidak semudah membalikan telapak tangan. Meski sejak awal sudah tampak bibit-bibit harmoni, namun kunci perjalanan itu terletak pada rasa saling mengerti, menyadari dan menghormati antar identitas budaya lain. Kesadaran dan kepedulian terhadap identitas budaya menjadi hal yang sangat krusial di tengah keragaman masyarakat. Tanpa mengesampingkan identitas aslinya, masyarakat menyadari dan terbuka bahwa antar identitas budaya tidak kontradiktif; memiliki persamaan nilai dan substansi. Para informan sangat menyadari bahwa proses mengubah nilai-nilai yang sudah menjadi bagian hidupnya tidaklah mudah, karena itu perlu intensitas waktu dan frekuensi tinggi untuk melakukan komunikasi antarbudaya di tengah lingkungan yang baru.

“Mungkin ini bagian dari adat budaya orang suku asli. Mereka sangat terbiasa dengan menonjolkan dirinya. Mereka akan sangat terpandang dan senang jika bisa tampil di depan pada acara dan kegiatan tertentu. Sebelum orang lain, kalau bisa saya duluan yang maju dan tampil di depan. Mungkin ini sudah menjadi prinsip dan karakter mereka, padahal belum tentu semuanya mampu menguasai persoalan yang dimaksud. Meski memiliki watak keras, masyarakat pribumi tetap baik, tapi kebaikan ini tergantung pada *piil* (harga diri) yang dimilikinya. Kemana-mana mereka menonjolkan *piil*-nya, sehingga terkesan seperti orang yang sombong.” (Sutanto, warga masyarakat).

“Kalau pas ketemu yang baik, orang itu akan baik banget dengan kita. Bahkan mereka mau mengangkat sebagai saudara. Ada juga keluarga kami yang menikah dengan suku asli

¹ Merupakan sebutan untuk transmigran Jawa yang pindah ke Lampung melalui program kolonisasi yang diselenggarakan pada masa pemerintah Hinda Belanda.

Lampung. Memang kami harus menunaikan perkara adat, namun menurut saya tergantung watak dan karakter orangnya masing-masing. Tidak semuanya seperti itu. Memang rata-rata mereka ngomongnya kenceng dan keras, seperti sedang membentak. Awalnya kami sangat kaget, tapi kalau diperhatikan karakter bicara mereka nadanya tinggi-tinggi dan lantang. Memang ada sedikit kekurangannya, mereka susah untuk melebur dan *srawung* dengan kita. Kalau diperhatikan, mereka itu bergaul karena ada keperluan saja. Jadi, kami itu sebenarnya canggung, tapi mau bagaimana lagi. Kita ini transmigran, ya harus bisa menyesuaikan diri dan *pinter-pinter ngemong-lah*.” (Bambang dan Darsono, warga masyarakat).

“Saya salut dengan orang Jawa, mereka itu sangat ulet. Saya suka bergaul dengan mereka. Jika punya keinginan mereka itu mau bekerja keras dan rajin. Pokonya tidak punya gengsi, mereka mau kerja di kebun kita, menjadi tukang bangunan. Dari rajin kerja inilah mereka bisa beli hewan ternak, beli kendaraan dan lainnya. Berbeda dengan kita, kalau yang muda-muda biasanya gengsi untuk kerja di kebon dan ladang.” (Idham, warga masyarakat adat)

“Yang namanya manusia itu macam-macam, ada yang baik ada juga yang tidak. Samalah seperti kita. Kalau mau baik, ya kita ini juga kan bisa baik. Pada dasarnya kita ini punya prinsip masing-masing. Kita punya adat dan budaya, para transmigran juga punya adat dan budaya. Kalau ada kuda lumping saya juga suka melihat, dan kalau ada *gawie adat* mereka juga banyak yang datang melihat.” (Maulana dan Hans, warga masyarakat adat)

Informasi di atas menunjukkan proses berlangsungnya komunikasi antarbudaya di tengah masyarakat. Terdapat perbedaan latarbelakang budaya, seperti adat-istiadat; norma susila atau nilai-nilai sosial antara masyarakat asli (*host culture*) dan masyarakat asing (*strangers*). *Host culture* dan *stranger* sama-sama memandang jika persamaan nilai-nilai budaya dapat mengkonstruksi suatu sistem kehidupan bersama dengan saling menyesuaikan. Setidaknya akan muncul dua faktor yang terlibat mempengaruhi spirit kolektifitas antara *host culture* dan *strangers* di Kota Metro. Dari aspek internal, munculnya ikatan emosional akan menjadi faktor yang mempererat rasa persatuan, kesatuan, kekeluargaan dan kasih sayang. Pada aspek eksternal, latarbelakang keberadaan masyarakat di suatu kawasan dengan posisinya saling berdekatan, juga menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya spirit kolektifitas. Jadi, keberlangsungan komunikasi antar-budaya secara massif dan aktif akan menjadi *keyword* untuk menentukan baik-tidaknya kedua faktor itu membentuk kebersamaan sosial yang kokoh. Tapi sebaliknya, jika kedua faktor ini saling bertabrakan dan dimaknai negatif, maka akan muncul partisi dan sekatan-sekatan komunikasi antarbudaya. Imbasnya, di tengah-tengah *host culture* dan *strangers* akan muncul jarak sosial, stereotip-stereotip dan sikap etnosentrisme.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa di tengah sebaran penduduk Kota Metro telah terkonstruksi pembauran antaretnis. Sebenarnya, pola hubungan yang terbangun sejak lama ini masih diselubungi oleh perasaan in-group dan out-group; stereotip serta sikap etnosentrisme. Menariknya, masyarakat berupaya mempertahankan identitas etnisnya masing-masing dengan tetap menjaga nilai-nilai, norma dan etika yang dimiliki oleh *host culture*. Sejalan dengan itu, masyarakat pendatang (*strangers*) pun terus berupaya memahami dunia, budaya dan perilaku masyarakat pribumi sesuai dengan kerangka persepsi yang mereka miliki. Para pendatang juga berupaya untuk melebur dengan masyarakat asli sambil berusaha untuk saling memahami karakter budaya dan pengalaman-pengalaman yang berbeda dengannya. Akhirnya, antara *host culture* dan *strangers* terbentuk tali simpul yang mengikat hidup berdampingan. Selain itu, masyarakat pun mampu menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama, seperti: menjaga

keamanan lingkungan; menolong tetang yang terkena musibah atau sedang ada hajatan; bergotong royong membersihkan lingkungan; dan aktif dalam kegiatan menjaga kerukunan antar umat beragama. Fenomena ini memperlihatkan upaya dan usaha dari kedua belah pihak (*host culture* dan *strangers*) untuk dapat saling memahami dan menjaga komunikasi antarbudaya. Alhasil, masing-masing masyarakat rela menahan dirinya untuk tidak mengembangkan atau menonjolkan prasangka dan sikap etnosentrisme.

Munculnya nilai, norma, dan etika positif di tengah keragaman bisa menjadi *blue-print* karakter kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, etnis Lampung sebagai *host culture* memiliki pandangan bahwa, keharmonisan dan hubungan yang paling kuat hanya akan bisa dibangun atau dibentuk melalui saling menjunjung tinggi kehormatan, saling bersilaturahmi dan memberi, saling membaur dan bermusyawarah, saling menolong dan bergotong royong, serta saling menjaga harga dirinya masing-masing. Inilah maksud dari modal identitas sosial dan budaya *ulun* Lampung yang dikenal sebagai *piil pesenggiri*. Bagi mereka, *piil pesenggiri* merupakan lima kesatuan nilai yang mencakup prinsip dasar kehidupan, yakni: *juluk adek* (menjunjung tinggi kehormatan); *nemui nyimah* (suka bersilaturahmi dan memberi); *nengah nyappur* (suka berbaur dan bermusyawarah); *sakai sambayan* (suka menolong dan bergotong royong); dan *piil pesenggiri* (memiliki harga diri), (Hadikusuma 1989; Martiara 2012; Muzakki 2017).

“Dari prinsip-prinsip inilah masyarakat Lampung – Buay Nuban khususnya memiliki spirit kebersamaan dan keberterimaan, sehingga kami rela “mewakafkan” sebagian tanah adat kami untuk dijadikan tanah hunian bagi saudara-saudara baru kami yang datang dari tanah sebrang. Kami tidak pamrih apa-apa. Kami hanya ingin kita saling percaya dan menjaga *bumie sai wawai* ini bersama-sama.” (Humaidi Elhudri Glr. *Suttan Kanjeng Sunan Agung*, tokoh masyarakat adat Lampung)

“... *Piil pesenggiri* itu tatanan moral sekaligus pedoman bersikap dan berperilaku masyarakat adat Lampung. ...*Piil*, itu sama dengan *fiil* dalam Bahasa Arab yang artinya perilaku, dan *pesenggiri* maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban” (Syahbudin Yusuf, tokoh Masyarakat)

“*Piil pesenggiri* itu suatu keutuhan dari unsur-unsur *juluk-adek*, *nemui-nyimah*, *nengah-nyappur*, dan *sakai-sambaiyan* yang berpedoman pada *Titie Gemattei* adat dari leluhur mereka. Jadi pada dasarnya ini merupakan keinginan bersama untuk menjaga harmoni” (Raja Bastari Wijaya, tokoh masyarakat).

“Kalau saya perhatikan, Kota Metro memang unik. Masyarakatnya sangat beragam dan heterogen. Etnis-etnis yang ada di kota ini memiliki identitas budayanya masing-masing, tapi sejauh ini mampu membangun kehidupan yang sangat harmonis. Satu hal yang menarik dan menjadi perhatian saya adalah falsafah hidup masyarakat pribumi. Sejauh ini, *piil pesenggiri* belum mampu secara sempurna diimplementasikan oleh pemiliknya sendiri, apalagi dipahami secara gamblang oleh yang lainnya. Bagi masyarakat pendatang, *piil pesenggiri* masih menyimpan makna negatif.” (Rifian Cheppy, Budayawan Lampung).

Kelima komponen *piil pesenggiri* merupakan seperangkat nilai praktis dan norma sosial yang akan menjadi *guide* bagi seseorang untuk menuju puncak etika dan kebijaksanaan. Berdasarkan pada informasi dan pengamatan di lapangan, transformasi kelima nilai falsafah hidup *ulun* Lampung terjadi *missing link*. Kandungan nilai-nilai luhur *piil pesenggiri* belum terdistribusi secara sempurna dan *clear*, baik untuk level *in-group* maupun *out-group*. Sejauh ini, *piil pesenggiri* bagi *strangers* masih menyisahkan stereotip dan prasangka negatif, (Fernanda and Samsuri, 2020; Utama, 2019; Irianto and Margaretha, 2011). Reduksi dan kontaminasi ini terjadi karena dipicu oleh perilaku-

prilaku yang tidak sepadan dengan spirit *piil pesenggiri* oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan *host culture*.

“Awalnya, saya mempersepsikan orang Lampung itu keras dan kasar, kurang bersahabat dengan pendatang. Tapi, seiring berjalannya waktu dan pergaulan saya dengan masyarakat pribumi, tidak semuanya berperilaku demikian. Saya rasa masih banyak kesalahan masyarakat dalam memahami *piil pesenggiri*, sehingga *piil* hanya dijadikan sebagai “senjata” harga diri yang harus ditegakkan tanpa melihat konteks yang ada. Bagi kalangan tertentu yang memahami *piil pesenggiri*, mereka akan berperilaku sopan dan ramah, saling menghargai, dan tidak berperangai keras. Saya pikir ini sangat terbatas jumlahnya.” (Solihin, warga masyarakat).

“Saya pikir mereka punya prinsip yang keras. Kemana-mana mereka pergi membawa *piil*, hanya saja *piil* itu tidak pas penempatannya. Kami memiliki kesan bahwa mereka itu keras dan seolah-olah mau menangnya sendiri. Ini menurut mereka adalah *piil*, sebuah harga diri yang tidak bisa dikutak-katik lagi.” (Bambang, warga masyarakat).

“Kesan negatif menurut saya itu tergantung pada lama dan tidaknya seseorang bergaul dan bersikap terbuka dengan masyarakat pribumi. Setelah saya bergaul dengan etnis pribumi, kita akan semakin tahu bahwa mereka itu punya prinsip yang harus ditegakkan. Kita harus memahami itu, yang utama adalah kita harus pandai-pandai membawa diri dalam bergaul dimanapun kita berada.” (Darsono, warga masyarakat).

“Saya mengakui bahwa tidak semuanya masyarakat kami memahami *piil pesenggiri*. Kalau yang paham, pasti dia akan bisa menempatkan dirinya dalam bergaul dan berbaur. Tapi bagi mereka yang tidak memahaminya, maka *piil pesenggiri* ini akan dimaknai “*senggol bacok*”. Maksudnya, ketika dirinya tersentuh atau tersinggung, maka yang akan muncul sikap kerasnya. Pemahaman seperti inilah yang tidak benar. Masyarakat masih belum melibatkan komponen *piil pesenggiri* yang lain, maka spontanitas yang muncul berperilaku keras.” (Humaidi Elhudri, Gelar *Suttan Kanjeng Sunan Agung*, tokoh masyarakat adat Lampung).

“Memang ada yang tidak pas dalam memahami *piil pesenggiri*. Selama ini masih banyak masyarakat yang hanya memahami *piil* sebagai harga diri, *tok*. Mereka tidak berpikir jika harga diri itu akan tegak apabila harus ditopang oleh komponen *piil* yang lainnya. Untung saja masyarakat pendatang, punya prinsip yang tidak keras sehingga bisa memahami kami.” (Syahbuddin Yusuf, tokoh masyarakat adat Lampung).

Informasi diatas menarasikan bahwa ada usaha dan upaya dari kedua belah pihak – pribumi dan pendatang – untuk menjaga komunikasi antarbudaya secara harmonis. Meski perbedaan itu sangat tampak, namun secara umum kedua masyarakat – *host culture* dan *strangers* – berusaha untuk tidak mengembangkan sikap etnosentrismenya masing-masing. Harus diakui bahwa sikap ini kadang-kadang muncul tanpa disengaja. Tidak sedikit masyarakat pendatang yang masih mengukur dan menilai corak kebudayaan etnis lain menggunakan nilai yang ada dalam kebudayaannya sendiri. Namun demikian, masyarakat pendatang tidak pernah tinggal diam, yakni terus belajar dan merespon perilaku budaya setempat secara konsisten. Sementara masyarakat adat Lampung sebagai *host culture* memiliki peluang besar untuk menegaskan kearifan lokal *piil pesenggiri* sebagai prinsip dan pandangan kolektif masyarakat. Sekalipun masyarakat lain sudah memiliki prinsip atau falsafah hidup masing-masing, bagi masyarakat adat *piil pesenggiri* “wajib” dipahami dan ditegakkan di “*Bumie Ruwai Jurai*”. Prinsip-prinsip ini harus menjadi kesepakatan nilai ataupun acuan kolektif yang ditempatkan diatas prinsip kelompok dan golongannya dalam praktik interaksi sosial dan penyelesaian masalah. Sehingga dalam konteks dan ruang lingkup kota Metro, kuantitas kasus-kasus konflik yang dipicu oleh adanya keberagaman dan multicultural jumlahnya sangat rendah. Fenomena demikian ini menjadi bukti dan pembeda atas tumbuhnya kesadaran

masyarakat untuk dapat menahan diri dan menjaga agar tidak menabrak batas-batas kelompok lain.

Membangun pondasi keharmonisan dan kesadaran berinteraksi di Kota Metro telah dilakukan sejak awal dari datangnya para transmigran Jawa. Kesadaran kolektif menjaga keharmonisan menjadi konsensus bersama dalam mensukseskan pembangunan. Di tengah pergumulan social dan budaya, masyarakat menjadi lebih matang dan tidak mudah terbakar oleh informasi-informasi provokatif yang bersifat memecahbelah hubungan antar kelompok yang sudah terbangun sejak awal. Masyarakat adat Lampung menawarkan *piil pesenggiri* sebagai modal budaya yang komplementer untuk merekatkan seluruh elemen masyarakat Kota Metro yang sangat beragam—baik dari sisi suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah dilakukan oleh masyarakat adat, karena nilai-nilai *piil pesenggiri* belum sepenuhnya “membumi” dan dipahami secara “kafah” di lingkungannya sendiri. Pengenalan dan sosialisasi nilai-nilai *piil pesenggiri* akan semakin berat dikerjakan ketika di tengah masyarakat umum tertanam stigma negatif dan stereotip tentang itu. Namun demikian, keinginan kuat masyarakat adat mewujudkan *piil pesenggiri* sebagai identitas bersama terus disosialisasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, kegiatan ini dirayakan oleh masyarakat melalui even rangkaian hari ulang tahun Kota Metro pada setiap tanggal 9 Juni. Nilai-nilai luhur tersebut dikemas dalam bentuk kegiatan parade budaya yang tujuannya tidak hanya sekadar pengakuan terhadap semua kelompok, namun lebih penting dari itu adalah peringatan atas wadah utama identitas ke-Lampungian yang diletakkan pada prinsip-prinsip *piil pesenggiri*. Partisipasi dan keterlibatan kelompok masyarakat bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang keberadaan mereka. Selain itu, parade budaya yang ditampilkan tersebut menjadi bentuk-bentuk penegasan kembali atas batas-batas yang harus diperhatikan oleh kelompok lain dalam kerangka hubungan sosial yang didasari oleh *piil pesenggiri*.

4.2 Berbahasa dengan Luwes dan Fleksibel

Keberagaman menjadi realitas sosial yang sangat menonjol di Kota Metro. Dari segi etnisitas, terdapat beragam etnis dengan bahasa ibunya masing-masing hidup bersama di dalam ruang sosial. Unikny, suku bangsa lokal Lampung bukanlah etnis dominan di Kota Metro. Proporsi penduduk etnis Lampung hanya menempati urutan kedua (16,7 persen), di bawah etnis Jawa yang menjadi etnis dominan (49,6 persen). Komposisi tersebut dilengkapi dengan etnis Minangkabau (6,5 persen), etnis Sunda (3,6 persen), etnis Palembang (2,2 persen), dan sisanya sebanyak 20,9 persen terdiri dari banyak etnis misalnya Tionghoa, Madura, Banjar dan sebagainya. Dari segi pemeluk agama, sebagian besar penduduk (93,4 persen) adalah pemeluk agama Islam, diikuti dengan pemeluk Protestas (2,7 persen), Katolik (2,4 persen), Buddha (1,1 persen), Hindu (0,2 persen), dan sisanya Konghucu, **BPS**.

Pluralitas etnis ini juga terlihat pada bahasa yang digunakan komunikasi sehari-hari. Selain menggunakan bahasa Lampung, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa juga digunakan dalam percakapan sehari-hari.



Tabel. 1 . Dinamika Penggunaan Bahasa Lampung dalam Komunikasi Masyarakat

Statement	Tokoh	Coding
"...bahasa Lampung jarang sekali dipakai dalam komunikasi di luar suku Lampung, bahkan orang Lampung justru banyak menggunakan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa itu tergantung dengan siapa dia bicara, kalau ketemu dengan orang Jawa, orang Lampung pun pakai bahasa Jawa. Kalau ketemu orang Minang ya pakai bahasa Minang meski sepotong-sepotong saja..."	(Syahbudin Yusuf, tokoh masyarakat).	Adaptif
"...orang Lampung berbahasa Lampung biasanya dipakai pada gelaran adat Lampung seperti acara pernikahan, acara pemberian gelar, serta musyawarah adat. Pada acara semacam ini menggunakan bahasa Lampung adalah keharusan,"	(Humaidi Elhudri Glr. <i>Sultan Kanjeng Sunan Agung</i> , tokoh masyarakat)	Sesuai kebutuhan
"...umumnya orang Lampung menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari, baik untuk urusan resmi dan tidak resmi. Di dalam keluarga suku Lampung sendiri pun kini sudah jarang percakapan dengan menggunakan bahasa Lampung, baik itu dengan bapak, ibu dan anak-anak dalam keseharian,"	(Muadin Efruari, Ketua Dewan Kesenian Kota Metro)	Efektif
"...tidak semua orang dari masyarakat adat Lampung menggunakan bahasa daerahnya ketika berkomunikasi. Mereka sangat fleksibel dan cenderung tidak memaksakan memakai bahasa daerahnya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang menggunakan bahasa dari masyarakat pendatang yang dijumpainya. Meski terbata-bata, mereka berusaha menyapa dengan bahasa orang-orang yang ditemuinya,"	(Raja Bastari, tokoh masyarakat).	Fleksible

Dalam konteks kekinian, keberlangsungan bahasa daerah merupakan problem mendasar bagi masyarakat adat Lampung. Ancaman ini sangat terasa dirasakan pemiliknya, karena kesadaran menggunakannya sudah mulai menurun. Di lingkungan keluarga Lampung saja, bahasa lokal ini tidak selalu digunakan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga. Hanya pada acara ritual adat, bahasa Lampung aktif digunakan. Sekalipun bahasa Lampung telah dijadikan mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah formal, namun sedikit sekali masyarakat yang secara intens mempelajarinya. Meski demikian, tokoh-tokoh adat tidak mempersoalkan penggunaan bahasa lokal secara serius. Berbeda halnya dengan ihwal *piil pesenggiri*, yakni "harga diri" yang harus tetap ditegakkan dalam konteks apapun. Penggunaan bahasa Lampung, yang *notabene* hanya 'milik' suku bangsa Lampung yang jumlahnya hanya 17 persen dari populasi, bersama-sama dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta bahasa Jawa sebagai bahasa etnis dominan, merupakan pengakuan dan penghormatan atas kultur lokal. Hal ini secara langsung berhubungan dengan pembentukan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang dibagi secara bersama oleh semua etnik terhadap Kota Metro. Tidak adanya

dominasi etnisitas semacam ini menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya komunikasi kultural yang egaliter dan saling menghormati sesuai dengan prinsip *juluk adek* dan *nengah nyampur* dalam *piil pasanggiri* Lampung.

4.3 Ruang kolektif yang masih terpelihara

Beberapa bentuk komunikasi yang dibangun atau diaplikasikan, baik oleh pemerintah maupun organisasi massa cukup bervariasi, antara lain: melalui kegiatan bakti sosial; kemah bersama lintas agama; dialog lintas agama; doa bersama lintas agama; dan parade budaya. Banyaknya kegiatan-kegiatan kolektif yang melibatkan kelompok sosial yang berbeda menjadi ajang terjadinya komunikasi budaya. Ruang-ruang komunikasi kultural tersebut terbentuk pada berbagai macam level, mulai dari acara-acara yang diinisiasi dan diorganisir secara mandiri oleh komunitas seperti “kenduri” hingga kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah semacam kegiatan parade budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Metro. Contoh lainnya adalah kemah pemuda lintas agama yang dilakukan oleh FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama). Pun forum bersama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dimotori oleh LSM Yabima (Yayasan Bina Masyarakat) Kota Metro dalam menyusun kurikulum pendidikan harmoni dengan melibatkan berbagai yayasan berlatar belakang agama menjadikan komunikasi antarkelompok sosial menjadi tradisi yang berperan penting dalam pembentukan harmoni. Tidak hanya itu, Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kota Metro juga turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, yakni melalui kegiatan sosialisasi nilai-nilai falsafah *piil pesenggiri* dan adat istiadat di sekolah, kelurahan dan kecamatan.

Tabel. 2 Kegiatan Sosial dan Dialog Antaragama di Kota Metro

STATEMENT	TOKOH	KEGIATAN
“Semoga apa yang telah kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi warga dan Kota Metro, dan kami berharap warga Tionghoa Kota Metro terus bergandengan tangan dalam PSMTI untuk mewujudkan kegiatan sosial yang berguna untuk kita semua khususnya warga Kota Metro”.	Gunawan Qie, tokoh agama	Bedah Rumah
“Secara kelembagaan, FKUB Kota Metro selalu mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Tujuan dari forum ini untuk menjamin situasi kondusif di Kota Metro dan juga untuk menghindari berbagai pemahaman yang menyimpang. Upaya ini untuk menciptakan kedamaian bagi para pemeluk agama yang ada di Kota Metro”,	HM. Saleh, ketua FKUB Kota Metro.	Dialog Antaragama
“Dalam hal memberikan bantuan-bantuan, baik dalam bentuk apapun, kita melihat manusianya. Bukan soal agamanya. Soal agama itu pribadi. Seperti saya bersaudaran dengan Pak Syahro; saya melihat sifatnya yang baik, kepribadiannya baik yang diciptakan Tuhan itulah kawan saya. Maka dalam kehidupan nanti akan muncul suatu hasil akan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi cita-cita utama menjadi persaudaran sejati. Persaudaran sejati itu	YB. Bedjo, tokoh agama Katolik.	Bakti sosial



bagaimana, betul-betul sesuai dengan hatinya, pikirannya, alam budayanya, tradisinya dan agamanya”,		
“Sekarang ini kami ingin menggagas bagaimana menciptakan dan membuat kurikulum pendidikan harmoni bagi sekolah-sekolah. Makanya kami mengundang guru dan kepala sekolah yang ada di Kota Metro dan sekitarnya (baca; Lampung Tengah dan Lampung Timur) untuk mendiskusikan konsep pendidikan harmoni”,	Grace Purwanto Nugroho, Ketua YABIMA Kota Metro.	Menyusun kurikulum pendidikan harmoni
“Maka, tatkala mengadakan bakti sosial, derma atau sumbangan, kita tidak ada harapan bahwa orang yang kita beri itu untuk masuk agama kami. Murni membantu dengan ikhlas, walaupun ada pandangan bermacam-macam dari luar”,	FX. Sarimin, tokoh agama Katholik.	Bakti sosial
“Kondisi harmonis tidak dapat diwujudkan secara sepihak, tapi juga harus didukung dan direspon oleh semua lapisan. Sehingga, masing-masing itu akan saling menyadari keberadaanya”	R. Frederick, tokoh masyarakat	

Selain kegiatan komunal yang dilakukan bersama, jalur alternatif lain yang dijadikan media komunikasi oleh pemerintah maupun organisasi massa dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis adalah menumbuhkan kesadaran budaya melalui kegiatan parade budaya. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun secara rutin dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Metro oleh Pemkot Metro dan Dewan Kesenian Metro (DKM). Di dalam rangkaian kegiatan tersebut biasanya semua etnis yang ada diberikan ruang ekspresi yang cukup untuk menampilkan kekayaan kulturenya yang itu kemudian diangkat menjadi kekayaan budaya masyarakat Lampung.

Tokoh penting kegiatan ini menyatakan bahwa gelaran parade budaya merupakan ikhtiar bersama untuk menjembatani kesepahaman dan pembentukan identitas bersama sebagai orang Lampung atau orang Metro yang lepas dari kotak-kotak etnis maupun agama. Merawat seni dan budaya yang ada di Kota Metro, sama saja dengan merawat ke-*bhinnekaan* yang ada di tengah-tengah masyarakat. Secara tidak langsung, kegiatan ini berasosiasi dengan upaya menjaga identitas bangsa Indonesia.

“Sebenarnya sangat berat dan riskan. Kalau tidak hati-hati akan muncul dominasi-dominasi. Tapi penyadari ini sangat penting. Kalau tidak dikenali atau dikenalkan, tentunya kita tidak akan pernah mengerti makna keluhuran nilai dari masing-masing budaya yang ada. Parade-parade seperti ini sebenarnya ditujukan untuk membangkitkan dan memupuk keharmonisan masyarakat Metro”, (Muadin Efruari, Ketua Dewan Kesenian Kota Metro).

“Gelaran budaya ini adalah sebetulnya ikhtiar untuk mengenalkan masing-masing kebudayaan dari suku dan etnis yang ada di tengah masyarakat Kota Metro. Melalui proses pengenalan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang keluhuran nilai-nilai budaya yang dimilikinya, sehingga mereka akan saling menyadari dan menghargai perbedaan yang dimilikinya. Tentunya, jika nilai budaya itu dimaknai memiliki kesamaan-kesamaan, maka akan menimbulkan kesemakin-dekatan seseorang atau kelompok dalam melakukan interaksi. Sedangkan jika, setiap orang atau kelompok

memunculkan atau membesar-besarkan ketidaksetaraan nilai *social cultural* yang ada, maka akan berpengaruh terhadap hubungan yang semakin jauh, dan selanjutnya akan menghambat komunikasi antar individu maupun kelompok”, (Rifian Cheppy, Budayawan Lampung).

Partisipasi dalam kegiatan ini menjadi konfirmasi etnis yang ada di Metro dalam kerangka *piil pesenggiiri* yang menjadi identitas bersama. Dengan demikian kegiatan ini merupakan ruang bersama yang penting tidak hanya untuk rekognisi nilai-nilai luhur komunitas dan untuk penguatan identitas bersama tersebut.

Discussion

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kesamaan identitas yang dihayati dalam perbedaan, fleksibilitas penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, dan ruang bersama warga yang terpelihara telah menjadi faktor signifikan dalam pembentukan kohesi sosial masyarakat Kota Metro. Kesadaran untuk membangun harmoni dalam keragaman menjadi prasyarat kondisi yang menghantarkan pada situasi kota multicultural yang minim konflik. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan praktis juga berkontribusi terhadap pembentukan harmoni. Umumnya masyarakat memiliki kompetensi berbahasa dalam berbagai bahasa etnis dan itu berhubungan langsung dengan menipisnya barrier komunikasi antaretnis. Ruang bersama diciptakan sebagai medium untuk saling mendekatkan. Ikhtiar ini dilakukan bukan tanpa resiko dan resistensi di masyarakat, namun sejarah telah membuktikan potensi-potensi konflik itu dapat diredam sehingga konflik komunal akibat keberagaman warga tidak banyak terjadi. Fakta ini dapat dijadikan acuan dalam pembangunan harmoni masyarakat multicultural.

Situasi masyarakat multicultural di kota pinggiran yang harmoni merefleksikan keberhasilan sebuah proses kohesi sosial. Terdapat tiga faktor yang berperan penting dalam pembangunan harmoni. Pertama, adanya kepemimpinan agama, masyarakat, dan pemerintah yang kuat, yang tidak saja mampu memberikan suasana teduh, kebersamaan dan jaminan ketertiban, melainkan mewujudkan juga dalam keteladanan dan kerjasama. Pada saat bersamaan para tokoh mampu menjadi jembatan komunikasi positif antarkelompok. Peran ini dipresentasikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam berbagai ruang kolektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. Peran tokoh agama semacam ini, banyak dijumpai di berbagai wilayah dan negara lain (Mediawati 2019; Umami 2018; Sihombing, Abdullah, and Prasjojo 2020; Salim and Andani 2020; Fakhruroji 2015; Moywaywa 2018; Ngwoke and Ituma 2020; Pikoli, Trinugraha, and Yuhastina 2021). Hal yang menarik dari wilayah penelitian ini adalah fungsi profetis para tokoh agama dalam menyuarakan misi perdamaian, anti kekerasan dan penindasan, menjadi mudah dipahami dan dicerna oleh para pengikut karena dikontekstualisasikan dengan prinsip-prinsip dasar adat Lampung, yakni *piil pesenggiiri* yang disepakati sebagai mutual identity. Hal tersebut semakin kuat karena didukung oleh fungsi instruktif kepala daerah dan lembaga pemerintahan dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan harmoni. Tampilnya para tokoh-tokoh yang mampu mewakili dan dipercaya oleh masyarakat dalam proses pendidikan dan pembangunan harmoni sosial ini menjadi infrastruktur penting dalam proses pembangunan harmoni.

Kedua, adanya institusionalisasi harmoni yang maujud dalam bentuk kegiatan bersama. Harmoni sosial masyarakat Kota Metro telah mengakar sejak awal munculnya pemukiman di Metro dengan kerelaan masyarakat adat Lampung menyerahkan tanah dan

lahan untuk para pendatang awal (Muzakki 2015; Sudarmono 2004; Zulfa 2014). Prinsip-prinsip dalam *piil pesenggiiri* terkait keterbukaan dan kerelaan menolong tersebut bersambut dengan sifat kesantunan orang Jawa yang cenderung low-profile, sehingga memudahkan terbentuknya relasi kesepahaman yang baik antara dua etnis. Hal ini kemudian berkembang menjadi model komunikasi dan interaksi bagi etnis-etnis lain yang datang kemudian. Dengan kata lain, konstruksi harmoni sosial melalui proses akulturasi budaya sudah terbentuk sejak awal sebagai ruh relasi sosial antaretnis, antarpemeluk agama, dan antarkelompok di Metro. Situasi berbeda digambarkan oleh (Humaedi 2014), bahwa kegagalan akulturasi budaya dan ketiadaan ruang bersama baik secara fisik maupun imajiner menjadi akar masalah pecahnya konflik horizontal di masyarakat multi etnik. Institusionalisasi harmoni ini semakin meneguhkan terjadinya kesepahaman dan komunikasi antaretnis juga antarpemeluk agama, sehingga memperkecil peluang munculnya konflik horizontal akibat dari kesalahpahaman.

Ketiga, tumbuhnya kesadaran kolektif. Ujung dari institusionalisasi harmoni adalah terbentuknya identitas bersama yang diakui sebagai milik bersama dan dipatuhi sebagai acuan bersama dalam relasi sosial. Tampilnya identitas Lampung lengkap dengan prinsip *piil pesenggiiri* sebagai acuan bersama yang dipatuhi oleh semua etnis merupakan tali pengikat yang kuat bagi terbentuknya harmoni. Kerelaan untuk menempatkan nilai-nilai dasar adat Lampung, yang populasinya hanya 17 persen dari keseluruhan penduduk, adalah bukti bagaimana hubungan-hubungan sosial antaretnis/antarpemeluk agama di Metro tidak dibangun atas isu mayoritas-minoritas melainkan pada fungsi dan kompetensi yang direfleksikan pada penciptaan ruang-ruang bersama pada tabel 2. Kesadaran bersama sebagai 'warga Lampung', yang didefinisikan lebih luas serta didudukkan di atas etnis serta agama (Humaedi 2014) ini membuat landasan harmoni semakin menguat. Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama membentuk infrastruktur penting dalam pembentukan kohesi sosial dan harmoni di dalam masyarakat.

Conclusion

Ternyata apa yang selama ini dipahami tentang perbedaan latar belakang agama dan kebudayaan yang beragam dalam suatu masyarakat tidak selalu melahirkan konflik sebagaimana selama ini terjadi beberapa wilayah Indonesia atau di benua lain seperti Nigeria dan Kenya. Sebaliknya, keragaman itu dapat tumbuh menjadi semangat nasionalis dan kebhinekaan yang dikembangkan sebagai kekayaan jati diri dan identitas kebangsaan. Hasil penelitian pada masyarakat Kota Metro memperlihatkan bahwa terdapat tiga faktor penting yang berperan besar dalam pendidikan harmoni: (1) kepemimpinan yang kuat dan mengakar, (2) terinstitusionalisasinya harmoni dalam praktik kehidupan sehari-hari, dan (3) tumbuhnya kesadaran kolektif tentang identitas bersama dan nilai-nilai dasar yang diterima dan ditaati. Pemilihan nilai-nilai adat etnis Lampung, yakni *piil pesenggiiri*, sebagai prinsip dasar kehidupan bermasyarakat di Lampung merupakan pilar penting dalam penguatan pendidikan harmoni di Kota Metro.

Dialektika antara kerukunan beragama dan kebhinnekaan seringkali bergerak dalam aras yang berkebalikan. Ketika agama berjalan ke arah kebenaran yang monolitik, kebhinnekaan justru bergerak ke arah relativisme dan dialog. Penelitian ini berhasil menemukan titik temu dengan menempatkan isu kerukunan dan kebhinnekaan dalam kerangka structural yang menekankan pada aspek kepemimpinan, institusionalisasi

harmoni, dan pembentukan kesadaran bersama. Muara dari ketiga aspek tersebut adalah terbentuknya identitas bersama sebagai orang Lampung dan prinsip *Piil pesenggiiri* sebagai acuan nilai.

Akan tetapi, pernyataan di atas masih harus diuji lebih lanjut dengan konteks dan variable yang lebih beragam dan cakupan yang lebih luas. Untuk itu, studi tentang dialektika agama dan kebhinnekaan dalam penyusunan harmoni sosial perlu dilakukan studi lanjutan dengan konteks kultural, administrative, dan infrastruktur ekonomi politik yang beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pengujian ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan yang reliable tentang aspek yang mampu menekan konflik dan sekaligus menguatkan harmoni sosial.

References

- Abdullah, Irwan. 2003. "Politik Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keragaman Budaya Indonesia." *Masyarakat Dan Budaya*.
- 'Aini, Adrika Fithrotul, and Abdul Mustaqim. 2017. "Dialektika Agama: Harmoni Dalam Jemaat Ahmadiyah (Resepsi Jemaat Ahmadiyah Indonesia Manislor Kuningan Jawa Barat Terhadap Ayat-Ayat Jihad Dan Perdamaian)." *FIKRAH*. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1768>.
- Amin, Ash. 2008. "Collective Culture and Urban Public Space." *City*. <https://doi.org/10.1080/13604810801933495>.
- Bishwanath Sharma, Laimayum, and Thokchom Shantilata Devi. 2021. "Truth, Identity, Pluralism in Contemporary Society - Gandhi's Response." *Tattva Journal of Philosophy*. <https://doi.org/10.12726/tjp.25.1>.
- Dunn, Jennifer Leigh, and S. J. Creek. 2015. "Identity Dilemmas: Toward a More Situated Understanding." *Symbolic Interaction* 38 (2): 261–84. <https://doi.org/10.1002/symb.146>.
- Fakhrurroji, Moch. 2015. "Mediatization of Religion in 'Texting Culture': Self-Help Religion and the Shifting of Religious Authority." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i2.231-254>.
- Fergus, Karen D., and David W. Reid. 2001. "The Couple's Mutual Identity and Reflexivity: A Systemic-Constructivist Approach to the Integration of Persons and Systems." *Journal of Psychotherapy Integration*. <https://doi.org/10.1023/A:1016658301629>.
- Ferguson, Rene, and Cornelia Roux. 2003. "Teacher Participation in Facilitating Beliefs and Values in Life Orientation Programmes: Reflections on a Research Project ." *South African Journal of Education*.
- Fernanda, Fitra Endi, and Samsuri Samsuri. 2020. "Mempertahankan Piil Pesenggiiri Sebagai Identitas Budaya Suku Lampung." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22 (2): 168–77. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n2.p168-177.2020>.
- Foster, Raisa. 2012. "Dancing Recognition." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.188>.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat Dan Adat-Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.
- Haryanto, Joko Tri. 2014. "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komuntias Tengger Malang Jatim." *Analisa*. <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.15>.
- Hofstede, Geert, and Gert Jan Hofstede. 1991. *Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and Expanded 2nd Edition*. McGraw-Hill, New York New York.
- Humaedi, M. Alie. 2014. "Kegagalan Akulturasi Budaya Dan Isu Agama Dalam Konflik Lampung." *Analisa*. <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.11>.

- Indah Permata Sari. 2020. "Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*. <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.486>.
- Intan Pemata Sari, Irwan Abdullah Dan. 2014. "Politik Identitas Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus Badau Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat." *Jurnal Kawistara*. <https://doi.org/10.22146/kawistara.6378>.
- Irianto, Sulistyowati, and Risma Margaretha. 2011. "Piil Pesenggiri: Modal Budaya Dan Strategi Identitas Lampung." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 15 (2): 140–50. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i2.1420>.
- Issa, Abba Auwalu, and Muhammad Yunusa. 2015. "The Meaning and Theories of Intercultural Communication." *International Communication*.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Lichterman, Paul. 2008. "Religion and the Construction of Civic Identity." *American Sociological Review*. <https://doi.org/10.1177/000312240807300105>.
- Lombaerts, Herman. 2011. "The Impact of the Status of Religion in Contemporary Society upon Interreligious Learning." *The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II*. <https://doi.org/10.15633/pch.851>.
- Márquez, María Inés Nin. 2017. "From Conflict to Mutual Recognition." *Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration*. <https://doi.org/10.1515/pepsi-2017-0006>.
- Martiara, Rina. 2012. *Nilai Dan Norma Budaya Lampung Dalam Sudut Pandang Strukturalisme*. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta.
- Mediawati, Desi. 2019. "Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya." *Khazanah Hukum*. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7134>.
- Moywaywa, Charles. 2018. "Management of Religious Conflicts in Kenya: Challenges and Opportunities." *International Journal of Education and Research*.
- Mujib, Ibnu Mujib, Irwan Abdullah, and Heru Nugroho. 2013. "'ISLAM' in The Global Village: Post-Tsunami Dialog and Negotiation of Aceh Identity." *Al-Albab*. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v2i2.37>.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. 2012. "Islamic Dialectics and Local Culture in the Social Field as One of the Faces of Javanese Islam." *El-Harakah Journal*.
- — —. 2014. "Pendidikan Islam Inklusif-Multikultural: Upaya Memperkokoh Nilai-Nilai Kebhinnekatunggalikaan Sebagai Dasar Kepribadian Pendidikan Nasional." *AT-TARBAWI Jurnal Kajian Kependidikan Islam*.
- Mursyid, Ali. 2009. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama Di Berbagai Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Tim Peneliti Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Muzakki, Ahmad. 2015. *Rekam Jejak Menyusun Riwayat Kota: Sebuah Kajian Etnografi Menemukan Geneologi Kota Metro*. Metro: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Metro Lampung.
- — —. 2017. "Introducing Local Genius-Based Harmony Education (Piil Pesenggiri) Among The Indigenous People Of Lampung." *Penamas* 30 (3): 261–80. <https://doi.org/10.31330/penamas.v30i3.188>.
- Nasrullah, Rulli. 1970. "Konstruksi Identitas Muslim Di Media Baru." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.24090/komunika.v5i2.172>.
- Ngwoke, Peace N., and Ezichi A. Ituma. 2020. "Ethno-Religious Conflict and Sustainable Development in Nigeria." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i4.6090>.
- Pantelidou, Charikleia. 2011. "Convergences and Divergences of Public and Collective Space in the Western World Today." *International Critical Thought*. <https://doi.org/10.1080/21598282.2011.640166>.

- Paulston, Christina Bratt, Scott F. Kiesling, and Elizabeth S. Rangel. 2012. *The Handbook of Intercultural Discourse and Communication*. *The Handbook of Intercultural Discourse and Communication*. <https://doi.org/10.1002/9781118247273>.
- Pfaffendorf, Jessica. 2019. "Wayward Elites: From Social Reproduction to Social Restoration in a Therapeutic Boarding School." *Social Psychology Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/0190272519831978>.
- Pikoli, Wiliansyah, Yosafat Hermawan Trinugraha, and Yuhastina Yuhastina. 2021. "Peran Tokoh Agama Islam, Hindu, Dan Kristen Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Banuroja, Gorontalo." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.827>.
- Piller, Ingrid. 2011. *Intercultural Communication: A Critical Introduction*. *Intercultural Communication: A Critical Introduction*. <https://doi.org/10.1080/14708477.2012.662406>.
- Potemkina, Olga. 2010. "EU-Russia Cooperation on the Common Space of Freedom, Security and Justice—a Challenge or an Opportunity?" *European Security*. <https://doi.org/10.1080/09662839.2010.498009>.
- Prihantoro, Hijrian A. 2016. "Tekktur Baru Studi Islam; Prototipe Dialektika Agama Dan Realita." *Millah*. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss2.art1>.
- Russo, Angelina. 2011. "Transformations in Cultural Communication: Social Media, Cultural Exchange, and Creative Connections." *Curator: The Museum Journal*. <https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.2011.00095.x>.
- Salim, Ahmad, and Andani Andani. 2020. "Kerukunan Umat Beragama; Relasi Kuasa Tokoh Agama Dengan Masyarakat Dalam Internalisasi Sikap Toleransi Di Bantul, Yogyakarta." *Arfannur*.
- Sihombing, Adison Adrianus, Irwan Abdullah, and Zaenuddin Hudi Prasajo. 2020. "Nostra Aetate and Space for Religious Moderation: Interfaith Dialogue in Multicultural Indonesia." *Journal for the Study of Religions and Ideologies*.
- Stavrides, Stavros. 2012. *Common Space The City as Commons*. *Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Tenth Edition Paul*.
- Sudarmono. 2004. *Desa Kolonis Menuju Metropolis*. Edited by Edi Ribut Herwanto. Metro: Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Metro.
- Supardi, Supardi. 2013. "Pendidikan Islam Multikultural Dan Deradikalisasi Di Kalangan Mahasiswa." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*.
- Terlouw, Kees. 2018. "Transforming Identity Discourses to Promote Local Interests during Municipal Amalgamations." *GeoJournal*. <https://doi.org/10.1007/s10708-017-9785-8>.
- Tsavdaroglou, Charalampos. 2018. "The Newcomers' Right to the Common Space: The Case of Athens during the Refugee Crisis." *ACME*.
- Umami, Ida. 2018. "Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan Dan Akhlak Masyarakat Di Kota Metro Lampung." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.220>.
- Utama, Fitra. 2019. "Piil Pesenggiri Dalam Masyarakat Lampung : Antara Instrumen Bina Damai Atau Dalih Kekerasan." *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* Vol. 7 (2): 117–117. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/130>.
- Wong, Wai Kwok Benson. 2019. "The Ties That Bind: Mutuality of Political Destiny between Hong Kong and Taiwan." *Asian Education and Development Studies*. <https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2018-0117>.
- Yousefzadeh, Hasan. 2018. "The Islamic Basis for Mutual Understanding in Intercultural Communication." *Kom : Casopis Za Religijske Nauke*. <https://doi.org/10.5937/kom1802047y>.

Zulfa, Eva Achjani. 2014. "Bali Nuraga-Lampung: Identity Conflict Behind the Policy."
Jurnal Hukum Internasional.